

BAB I

LATAR BELAKANG

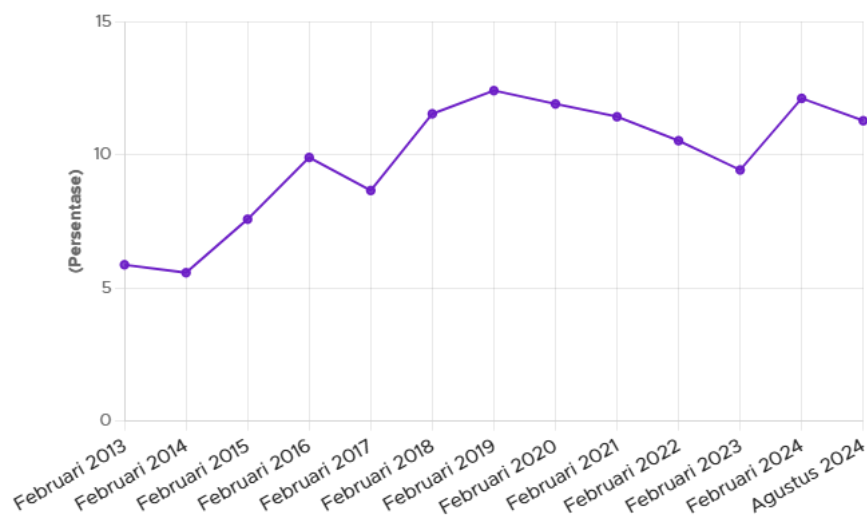
1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai moral yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berperan dalam mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mengembangkan potensi manusia secara holistik, meliputi aspek emosional, sosial, dan etika. Kualitas pendidikan dalam suatu negara merupakan penentu kemajuan dari negara tersebut (Kurniawati, 2022).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki indikator penting salah satunya adalah Pendidikan Berkualitas yang menempati SDGs nomor 4. Tujuan SDGs 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. SDGs 4 ini juga berkaitan dengan SDGs 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Ini dicapai melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, yang pada dasarnya akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan dapat meningkatkan kualitas hidup.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dunia kerja semakin kompleks. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis,

kemampuan adaptasi, serta pengalaman kerja yang relevan. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak lulusan masih dianggap belum siap terjun ke dunia profesional. Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa presentase sarjana pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013-2024.



**Gambar 1. 1 Presentase Pengangguran Lulusan Diploma IV, S1, S2, S3
Tahun 2013-2024**

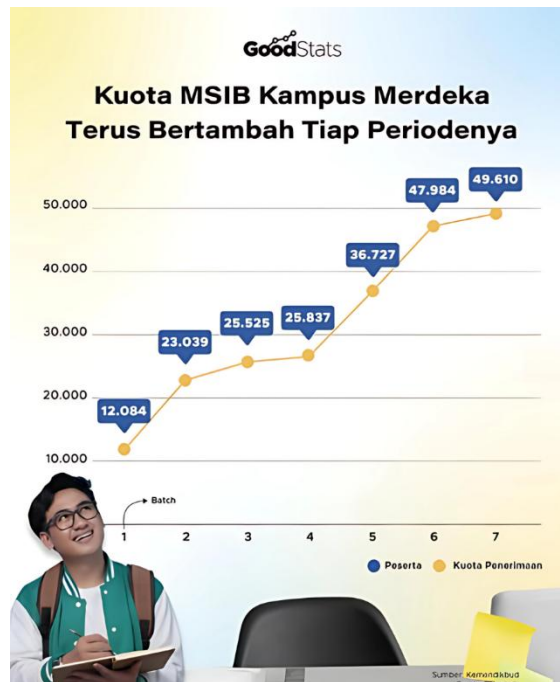
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa adanya indikasi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Pada dasarnya, lulusan sarjana memiliki knowledge skill yang lebih unggul yang seharusnya dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai tanggapan atas masalah tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pada pasal 18 dan 15. Pelaksanaan program ini dimulai pada tahun 2021. Tujuan utama dari program ini yaitu untuk menjawab tantangan atas kapasitas perguruan tinggi yang belum dapat beradaptasi secara cepat untuk mempersiapkan lulusan yang relevan sekaligus bermutu dengan hadirnya Industri 4.0.

Program MBKM ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan *hardskill* dan *softskill* mahasiswa, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan pengalaman mereka melalui berbagai kegiatan di luar kelas perkuliahan. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Program MBKM memberi mahasiswa kesempatan untuk terhubung langsung dengan dunia kerja (Atika, 2024). Mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus selama dua semester, yang membantu mereka memperoleh keterampilan tambahan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam program MBKM ini terdapat beberapa jenis kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan salah satu yang paling diminati adalah program Magang dan Studi Independen bersertifikat (MSIB). MSIB dirancang sebagai program persiapan karier yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka dengan jaminan konversi SKS yang diakui oleh perguruan tinggi.



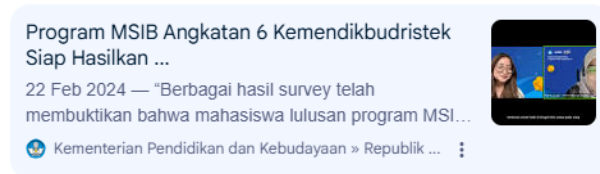
Gambar 1. 2 Peningkatan Kuota MSIB

Sumber: GoodStats (2024)

Sejak diluncurkan, program MSIB telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah peminat. Adanya jumlah peningkatan peminat ini sejalan dengan bertambahnya kuota yang dibuka tiap periodenya. Adanya peningkatan kuota tersebut, Kemendikbud melakukan kerjasama dengan berbagai mitra sehingga menimbulkan adanya peningkatan jumlah mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menghadapi tantangan nyata dalam industri, mahasiswa dapat membangun rasa percaya diri dan nilai diri yang penting untuk karir mereka.

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bukan hanya sekadar program pendidikan tambahan, ia merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Program ini tidak hanya memperkaya pengetahuan teknis tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi,

kerja tim, dan kepemimpinan. Adanya program MSIB ini diharapkan dapat memperpendek masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja.



Gambar 1. 3 Peluang Kerja bagi Alumni MSIB

Sumber: Kemendikbud.go.id (2024)



Gambar 1. 4 Perusahaan Utamakan Alumni MSIB

Sumber: Kemendikbud.go.id (2023)

Menteri Kemendikbudristek Periode 2019-2024, Nadiem Makariem, mengatakan bahwa mahasiswa lulusan program MSIB berhasil mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang lebih singkat dan dengan gaji diatas rata-rata *fresh graduate* lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Program MSIB Kampus Merdeka Kemendikbudristek, Wachyu Hari Haji, yang menyatakan bahwa rata-rata mahasiswa lulusan menghabiskan 4 bulan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Sedangkan lulusan MSIB rata-rata hanya membutuhkan waktu 1,3 bulan saja untuk memulai bekerja. Selain itu, dalam proses perekrutan karyawan banyak perusahaan mengatakan bahwa mereka akan memprioritaskan *fresh graduate* dengan pengalaman kerja industri, salah satunya melalui program MSIB. Hal ini membuktikan bahwa program MSIB memberikan pengaruh positif

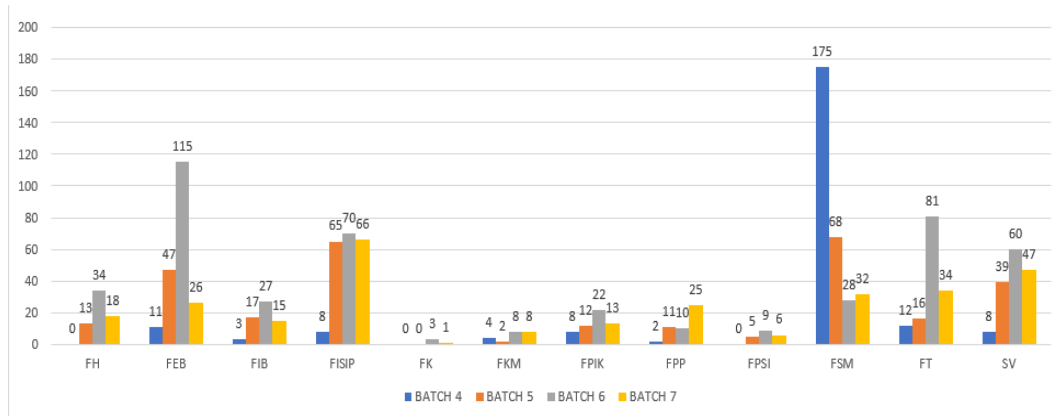
dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.



Gambar 1. 5 Top 10 Kampus dengan Peserta Lolos MSIB VI Terbanyak

Sumber: Prasetya Online Universitas Brawijaya (2024)

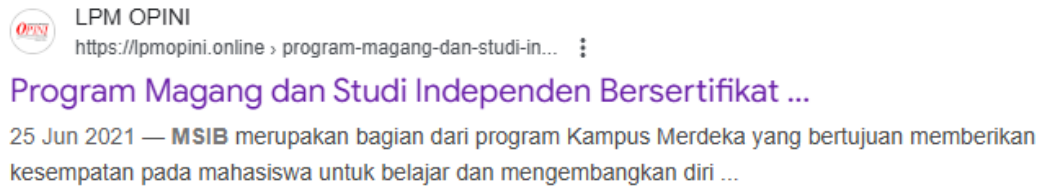
Berdasarkan data nasional, Universitas Diponegoro berhasil menempati posisi 10 besar sebagai perguruan tinggi dengan jumlah peserta lolos Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Batch VI terbanyak di Indonesia. Tingginya angka partisipasi ini juga semakin diperkuat dengan prestasi Universitas Diponegoro yang meraih peringkat pertama nasional dalam kategori universitas dengan alumni tercepat memperoleh pekerjaan, berdasarkan QS Graduate Employability Rankings 2021–2022. Peringkat tersebut menjadi indikator bahwa lulusan Universitas Diponegoro memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mampu menunjukkan performa unggul di dunia profesional.



Gambar 1. 6 Jumlah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang Lolos MSIB Batch IV-VII

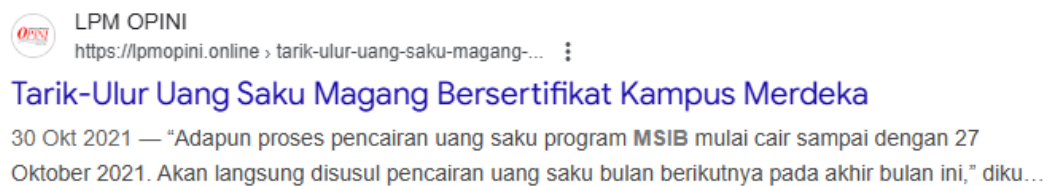
Sumber: Laporan Pelaksanaan MSIB Universitas Diponegoro (2024)

Universitas Diponegoro memiliki total 11 fakultas dan 1 sekolah vokasi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan MSIB Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah salah satu fakultas dengan total mahasiswa terbanyak yang berhasil lolos dalam Program MSIB dari Batch IV hingga Batch VII. Menurut data dari EduRank 2025, FISIP Universitas Diponegoro berada di peringkat kedua tertinggi di Indonesia dan di peringkat ke-87 di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa FISIP Undip memiliki tingkat persaingan yang tinggi, yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, termasuk mahasiswa aktif, alumni, dan pengajar, serta lingkungan akademik yang mendukung pembelajaran dan pengembangan kemampuan mahasiswa.



Gambar 1. 7 Informasi Program MSIB

Sumber: LPM Opini (2021)



Gambar 1. 8 Tarik Ulur Uang Saku Peserta MSIB

Sumber: LPM Opini (2021)

Banyaknya jumlah partisipasi peserta MSIB dari FISIP Universitas Diponegoro salah satunya didukung melalui adanya informasi yang dipublikasikan oleh LPM Opini, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro. Artikel LPM Opini di atas mengutip adanya informasi terkait tata cara pendaftaran, lini masa kegiatan magang, dan syarat mendaftar, serta manfaat yang diperoleh bagi peserta MSIB. Hal ini dapat membantu mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti program MSIB. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat suatu hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro selaku peserta MSIB. Dalam kutipan di atas, menjelaskan adanya permasalahan dalam proses pencairan uang saku yang disebabkan karena belum adanya sistem pencairan uang saku yang pasti.

Berdasarkan berbagai data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia

kerja. *Output* yang diharapkan dari program yang telah berjalan dari tahun 2021-2024 ini yaitu dapat mempersingkat masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja. Walaupun program ini dikatakan memberikan pengaruh positif dalam mempersingkat masa tunggu lulusan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Faktanya, berdasarkan data pada tahun 2021-2024, presentase sarjana pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang diluncurkan Kemendikbudristek ini belum sepenuhnya menjawab permasalahan pengangguran di Indonesia.

Kondisi ini menjadi dasar terbentuknya *research gap*, yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis terkait implementasi program MSIB pada mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro. Penelitian ini menggunakan Model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, yang memiliki 4 komponen yaitu konteks, input, proses, dan produk. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan rencana dan kebijakan MSIB dengan praktik implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro. Penggunaan Model CIPP dalam penelitian ini merupakan model yang paling tepat untuk digunakan karena memiliki regulasi di tingkat nasional dan universitas, yaitu dalam Panduan Pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang disusun dan disempurnakan oleh Kemendikbud pada tahun 2023, serta adanya Buku Petunjuk Teknis MBKM Universitas Diponegoro tahun 2021.

Dalam komponen konteks, penelitian ini akan menilai kesesuaian kebijakan MSIB dengan visi, misi, dan kebijakan akademik FISIP Universitas Diponegoro. Pada komponen input, penelitian ini akan melihat kesediaan pedoman, sistem

administrasi, mekanisme konversi SKS, dan penyebaran informasi MSIB di FISIP Universitas Diponegoro. Selanjutnya, pada komponen proses dalam hal ini akan menilai mekanisme pelaksanaan program dengan mekanisme yang tertera pada regulasi/acuan yang telah ada, seperti mekanisme pendaftaran, monitoring, proses sosialisasi MSIB kepada para peserta, serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan program MSIB. Dan pada komponen produk, pada penelitian ini akan membandingkan ketercapaian output dari program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro dengan output yang diharapkan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pengelola program serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, guna mendorong perbaikan dan pengembangan program MSIB ke arah yang lebih optimal di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Program MSIB dibentuk pada tahun 2021 dan sudah berjalan hingga tahun 2024. Salah satu tujuannya yaitu untuk mempersingkat masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan presentase sarjana pengangguran di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan program MSIB pada mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.
2. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program MSIB pada mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dengan tulisan ini dapat menambah referensi bagi para penulis yang menggunakan Model CIPP khususnya yang berhubungan dengan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai implementasi program magang MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap ketepatan implementasi kepada para pemangku kepentingan khususnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Mitra, Universitas, dan stakeholder-stakeholder terkait terhadap program magang MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENELITI/TAHUN	LINK JURNAL/DOI	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN	GAP PENELITIAN
1.	Analisis Implementasi Program Magang Dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Puangrimanggalatung	Herlina, Besse, dkk 2024	https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.158 .	Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program magang dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa Jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimanggalatung.	Teori keterampilan yang dikemukakan oleh Depdiknas. Keterampilan adalah kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar dan latihan yang terus-menerus, sehingga seseorang dapat melakukan suatu tindakan atau aktivitas dengan baik dan efektif	Kualitatif	Untuk meningkatkan efektivitas Program Magang di Jurusan Administrasi Publik, penting bagi instansi penerima magang untuk menyesuaikan tugas dengan minat dan keahlian mahasiswa serta memberikan bimbingan yang memadai. Koordinasi aktif antara fakultas dan instansi penerima juga diperlukan untuk memaksimalkan manfaat program dan mempersiapkan mahasiswa menuju karier di bidang administrasi publik.	- Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keterampilan. Sedangkan, penulis meneliti menggunakan model CIPP - Lokus penelitian ini yaitu mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Puangrimanggalatung. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

2.	Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Mahasiswa Terbuka dan Jarak Jauh sebagai Upaya dalam Menciptakan Mahasiswa Berkarakter dan Profesional	Halimah, Zulfitria 2024	https://doi.org/10.59818/jpi.v4i1.757	Untuk mengkaji implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Terbuka sebagai upaya menciptakan mahasiswa yang berkarakter dan profesional	Menurut Smaldino (2015), pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal yang berbasis institusi dimana kelompok belajar terpisah, peserta didik tersebar, dan digunakan telekomunikasi interaktif untuk mengontak peserta didik, sumber belajar dan instruktur.	Kualitatif	Implementasi Program MBKM pada Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh merupakan upaya dalam mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menjawab tantangan perihail perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (Outcome Based Education) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu.	- Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendidikan jarak jauh. Sedangkan peneliti menggunakan Model CIPP - Fokus penelitian yaitu program MBKM. Sedangkan, fokus penelitian peneliti yaitu program MSIB - Lokus penelitian ini yaitu Universitas Terbuka. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
3.	Evaluasi Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Devi Wulandari, dkk 2022	https://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/576	Meningkatkan partisipasi dan pengembangan program MBKM di tingkat Program Studi dan dapat	Teori evaluasi yang dikemukakan oleh Arikunto dan Abdul Jabar yang mengatakan	Kualitatif	Pada tahun 2021, Universitas Paramadina menghadapi berbagai kendala dalam penerapan program MBKM, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta	- Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi yang dikemukakan oleh Arikunto dan Abdul Jabar. Sedangkan, penulis

	(MBKM) di Tingkat Program Studi: Studi di Universitas Paramadina			menjadi masukan bagi Universitas dan Fakultas dalam mendorong peningkatan program MBKM menjadi lebih baik	bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif dalam mengambil sebuah keputusan.		monitoring dan evaluasi. Beberapa masalah utama termasuk kurangnya dokumen resmi, kesulitan dalam konversi SKS, serta komunikasi dan keterlibatan yang tidak optimal antara pihak terkait. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perbaikan seperti dukungan kebijakan yang jelas, peningkatan pelatihan, dan keseragaman prosedur monitoring.	meneliti menggunakan model CIPP - Fokus penelitian yaitu program MBKM. Sedangkan, fokus penelitian peneliti yaitu program MSIB - Lokus penelitian ini yaitu Universitas Paramadina. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
4.	Analisis Efektivitas Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Seluruh Indonesia	Mahayu Widiastu, dkk 2023	https://doi.org/10.24036/pakar.v21i2.334	Untuk menganalisis efektivitas program MSIB dalam meningkatkan kapabilitas mahasiswa dan kesiapan kerja	Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data	Kualitatif	Terdapat beberapa hambatan, namun program ini memiliki potensi besar dalam memperkuat kapabilitas mahasiswa, tetapi efektivitasnya dalam mengurangi angka pengangguran lulusan masih memerlukan evaluasi mendalam	- Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis tematik. Sedangkan, penulis menggunakan model CIPP - Lokus penelitian ini yaitu di seluruh Indonesia. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu

								mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
5.	Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur	Diana Hertati, Amelia Diva 2024	https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/24785	Mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur.	Teori implementasi kebijakan dari Edward III yang menggunakan Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.	Kualitatif deskriptif	Pertama, fokus komunikasi memerlukan lebih banyak kejelasan dan konsistensi dalam proses koordinasi antara pelaksana kebijakan, sehingga program dapat dianggap telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik. Kedua, fokus sumber daya memerlukan lebih banyak staf untuk Koordinator PT agar program dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Ketiga, fokus disposisi mencakup kognisi, tanggapan, dan respons. Keempat, meskipun SOP pelaksanaan tersedia, beberapa masih belum diterapkan sepenuhnya. Akibatnya, pelaksanaan SOP dalam kegiatan magang MSIB belum optimal.	- Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi Edward III. Sedangkan, penulis meneliti menggunakan model CIPP - Lokus penelitian ini yaitu Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

6.	<i>The Implementation of the Internship as a Coursework in Teaching and Learning Vocational Education</i>	Amin, Latif, Arsat, dkk 2020	https://doi.org/10.30880/jtet.2020.12.01.009	Untuk menyelidiki implementasi program magang sebagai salah satu pendekatan pedagogis dan metode penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata kuliah pendidikan vokasi di universitas	Dewey berpendapat bahwa “sedikit pengalaman lebih baik daripada banyak teori”, yang mendasari alasan penggunaan magang untuk menjembatani teori dan praktik dalam proses belajar mahasiswa	Kualitatif	Studi ini menunjukkan bahwa program tersebut secara efektif meningkatkan kemampuan teknis, soft skill, dan pengetahuan implisit siswa melalui pembelajaran praktik langsung di tempat kerja, menjadikannya strategi penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan siswa sebelum mereka memasuki dunia kerja.	- Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori <i>Experience Learning</i>. Sedangkan, penulis meneliti menggunakan model CIPP - Lokus penelitian ini yaitu Sekolah Vokasi Universitas Teknologi Malaysia. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
7.	<i>Evaluation of the MBKM Educational Internship Program and Flipped Classroom Oriented to the CIPP Model</i>	Kholifaturrohman, R., Siswandari, S., & Hindrayani, A. 2024.	https://doi.org/10.15294/4b07x274	Untuk menentukan sejauh mana tujuan program magang MBKM telah tercapai, tidak hanya terkait dengan penilaian	Model CIPP yang meliputi isi, input, proses, dan produk	Kuantitatif	Pelaksanaan program Magang Pendidikan MBKM dan penerapan model pembelajaran <i>flipped classroom</i> berjalan dengan baik.	- Fokus penelitian yaitu program MBKM. Sedangkan, fokus penelitian peneliti yaitu program MSIB - Penelitian ini menilai sejauh mana tujuan program magang MBKM telah tercapai. Sedangkan, penelitian

				kinerja, tetapi juga perbaikan				penulis bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan yang telah direncanakan
8.	A sustainability internship program: strategies for creating student stewards for sustainability	Miller, H., Miller Jr, B.R. and Spoelstra, J. 2021	https://doi.org/10.1108/IJ-SHE-08-2020-0314	Untuk mengeksplorasi strategi dan model yang efektif dalam merancang dan melaksanakan program magang keberlanjutan di lingkungan kampus universitas.	Pembelajaran berbasis pengalaman (<i>experiential learning</i>) berfokus pada proses pembelajaran, penemuan, dan refleksi diri mahasiswa terhadap pembelajaran yang mereka alami.	Kuantitatif	Konten dan model pembelajaran berbasis pengalaman dalam program magang keberlanjutan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta magang mengenai isu-isu keberlanjutan serta membentuk individu yang peduli terhadap keberlanjutan. Lembaga dan universitas disarankan untuk mempertimbangkan membuat program magang keberlanjutan mereka sendiri berdasarkan program di Western Michigan University, dengan menggunakan penilaian pre-test dan post-test sebagai metode evaluasi.	- Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode <i>experiential learning</i>. Sedangkan, penulis meneliti menggunakan model CIPP - Lokus penelitian ini yaitu Western Michigan University. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

9.	<i>The Effect of Internship and Work Motivation on Students' Work Readiness in Vocational Education: PLS-SEM Approach</i>	Fauzan Azhar, dkk 2023	https://doi.org/10.46843/jiecr.v4i1.413	Untuk mengungkap pengaruh pengalaman magang dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja	Menurut Chavan dan Carter, Teori Kesiapan kerja adalah kemampuan yang menunjukkan adanya koordinasi antara faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan dapat langsung bekerja setelah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diikutinya, tanpa memerlukan penyesuaian yang memakan waktu lama.	Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengalaman magang dan motivasi terhadap kesiapan kerja mahasiswa	- Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kesiapan kerja yang dikemukakan oleh Chavan dan Carter. Sedangkan, penulis meneliti menggunakan model CIPP
10.	<i>Evaluation of Internship Program</i>	Regita Wida Threnisa	https://doi.org/10.30574/	Mengevaluasi Program MBKM di	Model CIPP yang meliputi isi, input,	Kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat unsur-unsur	- Fokus penelitian yaitu program MBKM. Sedangkan, fokus

	<i>Kampus Merdeka in the Community-Based Total Sanitation Facilitator Field at Community Health Center Dr. Soetomo</i>	2024	wjarr.2024.2.2.1524	Dinas Kesehatan Kota Surabaya bidang Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	proses, dan produk		pada beberapa komponen yang dinilai masih belum sesuai dengan rencana program. Komponen isi belum sesuai tujuan program, komponen input masih kurang dari sumber daya manusia, komponen proses sesuai dengan jam operasional yang ditentukan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan belum optimal, komponen produk masih banyak dikembangkan karena terbatasnya peran mahasiswa magang.	penelitian peneliti yaitu program MSIB - Lokus penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sedangkan, lokus penelitian penulis yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
--	--	------	-------------------------------------	---	--------------------	--	---	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Tabel di atas memuat rangkuman sejumlah jurnal terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini, yakni mengenai pelaksanaan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Berdasarkan temuan dari studi-studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program MSIB memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan kerja, penguatan kompetensi profesional, serta keterlibatan aktif mahasiswa di lingkungan kerja nyata. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesesuaian antara penugasan dan minat mahasiswa, mutu pendampingan dari instansi mitra, efektivitas koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya pendukung, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil program.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai program MSIB milik Kemendikbudristek, penelitian ini mengandung *novelty* sebagai berikut: (1) Belum pernah ada penelitian sebelumnya yang menganalisis implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro menggunakan Model CIPP yang terdiri dari 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan produk, yang membandingkan apakah pelaksanaan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Kemendikbud melalui Panduan Pelaksanaan Program MSIB; (2) Belum ada penelitian yang mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.

1.6.2 Landasan Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik yang juga disebut Administrasi Negara, adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari tiga komponen utama kehidupan bernegara, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik, seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Ada dua definisi dari istilah "administrasi" dan "negara". Administrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana "administrator" berarti melayani atau membantu. Namun, istilah administrasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *Ad* (*intens*) dan *ministrare* (*to serve*), yang masing-masing berarti menyalani. Kata "negara" lebih sering digunakan daripada kata "*station*", yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "status", yang berarti "keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang tegak dan tetap."

Dalam buku karya Harbani Pasolong (2010:8), penulis mengatakan bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, beberapa ahli dalam buku tersebut mendefinisikan administrasi publik, sebagai berikut:

- 1) Menurut Chandler dan Plano, administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya personal publik untuk memformulasikan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik dikenal sebagai administrasi publik.

- 2) Menurut Nicholas, administrasi publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mendorong pemahaman pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus, administrasi publik adalah disiplin ilmu yang mencakup pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga politik dan koordinasi antara individu dan kelompok dalam upaya mewujudkan kebijakan tersebut. Administrasi publik juga mencakup aktivitas sehari-hari pemerintahan dan merupakan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik melalui pengarahan keterampilan, tujuan, dan upaya kolektif dari berbagai pihak.

Berbagai dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menghasilkan gagasan tentang ilmu administrasi publik untuk menyelesaikan masalah keberhasilan mengelola negara melalui perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ilmu ini pada dasarnya dapat ditelusuri melalui pergeseran paradigma. Adapun menurut Nicholas Henry, paradigma administrasi publik terbagi menjadi 5, antara lain:

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900 – 1926)

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White membagi pemerintahan ke dalam dua bagian utama, yaitu politik yang merumuskan kebijakan dan administrasi yang melaksanakannya. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, legislatif dan yudikatif menyampaikan kehendak negara, dan eksekutif menjalankan kebijakan secara netral. Ketika berbicara tentang

dikotomi antara politik dan administrasi, Goodnow menekankan bahwa administrasi publik harus berada dalam ranah birokrasi.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Selama periode ini, pemerintahan negara lebih berfokus pada administrasi negara itu sendiri. Dalam paradigma ini, perkembangan dikenal dengan prinsip POSDCORB, yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Pada paradigma ketiga, teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik, sehingga fokus utamanya adalah birokrasi pemerintahan. Namun, karena terlalu dekat dengan ilmu politik, administrasi publik dianggap kehilangan identitasnya.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Paradigma keempat menggambarkan administrasi negara sebagai ilmu dengan fokus, metodologi, dan teorinya sendiri. Sebagai ilmu, administrasi negara harus mengumpulkan pengetahuan berdasarkan data yang dapat diuji dan terbuka untuk kritik rasional untuk mendukung atau membantah kebenarannya.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an)

Paradigma kelima, titik utama teori organisasi adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak, dan bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Oleh karena itu, administrasi

negara saat ini berkonsentrasi pada teori organisasi, ilmu manajemen, dan kebijakan publik.

Penelitian mengenai implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro termasuk pada paradigma kelima. Karena untuk menganalisis implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro memerlukan teori manajemen dan kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pandangan paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik.

1.6.2.2 Konsep Governance

Konsep *governance* pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-14 dan kembali populer pada tahun 1989 oleh Bank Dunia sebagai pendekatan pembangunan yang menekankan pentingnya demokrasi dan hukum. Istilah ini digunakan untuk mendorong negara-negara penerima bantuan untuk menerapkan tata kelola yang efektif dan transparan. Akibat globalisasi, krisis ekonomi, dan penyebaran sistem demokrasi, perhatian terhadap *governance* semakin meningkat. Hal ini menghasilkan perubahan besar dalam cara memahami pengelolaan negara dan masyarakat.

Dalam buku karya Ali Farazmand (2004:7), UNDP mengatakan bahwa *governance* adalah pelaksanaan wewenang politik, ekonomi, dan administratif untuk mengatur urusan negara. Ini merupakan mekanisme, proses, hubungan, dan lembaga yang kompleks di mana warga negara dan berbagai kelompok menyampaikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka, serta menyelesaikan perbedaan mereka. UNDP juga mengungkapkan bahwa *governance* melampaui negara dan mencakup organisasi dari sektor swasta dan

masyarakat sipil. Semuanya terlibat dalam upaya untuk mencapai pembangunan manusia berkelanjutan.

Sementara itu, *Canadian Institute on Governance* tak hanya memberi penekanan pada aspek kekuasaan saja, tetapi juga pada aspek kebijakan yaitu *governance* mencakup kebiasaan, institusi, dan prosedur yang mengatur kekuasaan, pemungutan suara, dan pengambilan keputusan tentang masalah yang memengaruhi masyarakat, serta bagaimana para pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi kebijakan.

Terdapat beberapa komponen yang saling mempengaruhi dalam konsep *governance*. Dalam buku karya Sedarmayanti (2003:5), komponen dalam konsep *governance*, antara lain:

1) *State* (pemerintah atau negara)

Bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, peraturan, dan administrasi yang efektif, serta menciptakan lingkungan politik dan hukum yang aman.

2) *Private sektor* (sektor swasta atau dunia usaha)

Berkontribusi pada kemajuan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi lainnya.

3) *Society* (masyarakat)

Berpartisipasi secara aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, serta berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro termasuk pada penelitian dalam konsep *governance*. Karena untuk menganalisis implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro memerlukan komponen-komponen dalam konsep *governance*, seperti *state* (pemerintah), *private sector* (mitra yang bekerjasama), dan *society* (mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro).

1.6.2.3 Kebijakan Publik

Paradigma kelima administrasi publik yang dikembangkan oleh Nicholas Henry menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah fokus utama administrasi publik karena dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan masalah publik. Untuk menemukan solusi yang tepat, kebijakan tersebut harus dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, para administrator negara harus memahami dengan baik bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan.

Kebijakan publik adalah bagian penting dari setiap sistem pemerintahan karena berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik berkontribusi sebagai bagian dari upaya perbaikan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses perumusan kebijakan dengan menggunakan metode yang sistematis dan berbasis ilmiah. Fokus utama dari metode ini adalah peningkatan pemahaman dan perbaikan yang lebih baik tentang proses penyusunan kebijakan.

Merangkum beberapa definisi kebijakan publik dari buku karya Hermanto Suaib, dkk (2022:7-16) berjudul “Teori Pengantar Kebijakan Publik”, antara lain:

- 1) Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah semua keputusan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah mengambil banyak tindakan. Mereka mengendalikan konflik, mengorganisir masyarakat, memberikan penghargaan simbolis dan layanan material, dan mengumpulkan pajak.
- 2) Menurut Michael E. Kraft & Scott R. Furlong, kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik atas nama rakyat yang diwakili. Permasalahan publik termasuk hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat umum dan karenanya memerlukan intervensi pemerintah.
- 3) Menurut Jay M. Shafritz, *et al.*, kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan pemerintah dalam menanggapi masalah politik. Program publik mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan publik. Terkadang, hal ini memerlukan pembentukan organisasi, badan publik, atau biro, yang kemudian harus menciptakan lebih banyak kebijakan yang mengajarkan karyawan organisasi bagaimana menerapkan kebijakan publik secara umum.

Pembuatan kebijakan publik akan memberikan pengaruh kepada seluruh elemen yang berkaitan, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembuatan kebijakan yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan kebijakan. Menurut Ripley, tahapan penyusunan kebijakan publik terdapat 5 tahap, antara lain: (1) *Agenda Setting* (Penyusunan Agenda); (2) Formulasi dan Legitimasi; (3)

Implementasi Program; (4) Evaluasi dari Implementasi, Performa, dan Dampak; (5) Keputusan Kebijakan Baru.

Penelitian mengenai implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro termasuk pada tahap penyusunan kebijakan yang disampaikan oleh Ripley. Karena dalam merumuskan kebijakan, dibutuhkan adanya proses implementasi untuk menilai apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai yang direncanakan atau tidak. Serta untuk menentukan adanya perbaikan.

1.6.2.4 Implementasi

Implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik dalam suatu sistem pemerintahan, dan biasanya implementasi dilaksanakan setelah suatu kebijaksanaan ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2009), implementasi dapat didefinisikan sebagai proses keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan.

Menurut Lester dan Stewart (Nugroho, 2009), implementasi adalah proses yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan melalui proses politik. Tujuan dan sasaran suatu kebijakan dapat dicapai hanya jika tujuan dan sasaran tersebut telah didefinisikan, program-program telah dirancang, dan dana telah dialokasikan untuk mencapainya. Setelah itu, proses implementasi kebijakan dapat dimulai.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Goggin et al., 1984), implementasi merupakan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga dilaksanakan dalam bentuk perintah, keputusan eksekutif penting, atau keputusan badan peradilan.

Keputusan biasanya mencakup penjelasan tentang masalah yang harus diselesaikan, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai metode untuk mengatur atau menstrukturkan implementasi. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana yang didukung oleh aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangan studi implementasi, terdapat berbagai model yang telah dikembangkan untuk menganalisis proses pelaksanaannya dalam penelitian. Beberapa di antaranya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle, Van Meter dan Van Horn, George Edward III, dan Model CIPP. Setiap model ini menawarkan cara yang berbeda untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup hal-hal seperti sumber daya, komunikasi, dan dinamika lingkungan sosial dan politik yang memengaruhi proses pelaksanaan.

Adapun teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Teori ini memiliki empat variable yang memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena komunikasi yang baik memungkinkan para pengambil keputusan memahami tugas yang harus

dilakukan. Edward III menjelaskan bahwa proses komunikasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga elemen penting, antara lain:

- a. Transmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan adalah komponen sumber daya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yang merupakan salah satu faktor penting. Sumber daya berkualitas tinggi menentukan pelayanan yang baik, dan kualitas ini merupakan indikator penilaian masyarakat terhadap kinerja layanan secara objektif dan menyeluruh.

3. Disposisi

Faktor ini terkait dengan perasaan dan sifat implementator kebijakan. Keberhasilan implementasi dan pencapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang efisien sangat penting dalam implementasi kebijakan. Ketidakefektifan struktur birokrasi, termasuk kurangnya SOP, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, terutama jika kebijakan baru memerlukan perubahan cara kerja (Widodo, 2010). Fragmentasi birokrasi, yaitu penyebaran tanggung jawab ke berbagai

badan, meningkatkan kebutuhan koordinasi intensif agar instruksi tidak terdistorsi dalam implementasinya

Model implementasi digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang proses pelaksanaan kebijakan. Perencanaan yang baik bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, banyak faktor yang saling berhubungan memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, analisis model implementasi sangat penting untuk menemukan pendorong dan penghalang pelaksanaan kebijakan.

Pada penelitian mengenai Implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, model implementasi yang digunakan oleh peneliti adalah Model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Proses implementasi dalam model CIPP terdapat 4 komponen yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan program, antara lain:

a) Konteks

Komponen ini membantu dalam menentukan kebutuhan program, prioritas program, dan merumuskan tujuan program.

b) Input

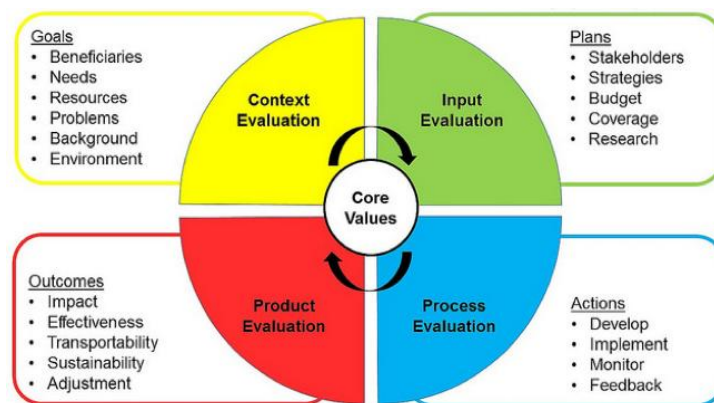
Input membantu dalam mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

c) Proses

Komponen ini memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang implementasi program sesuai rencana. Pengambil keputusan dapat mengetahui seberapa baik program tersebut telah diterapkan, termasuk konflik, dukungan staf, kekuatan dan kelemahan material.

d) Produk

Membandingkan pengukuran hasil program dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Hal ini memungkinkan pembuat keputusan untuk memutuskan apakah program harus dilanjutkan, diubah, atau dihentikan sama sekali.

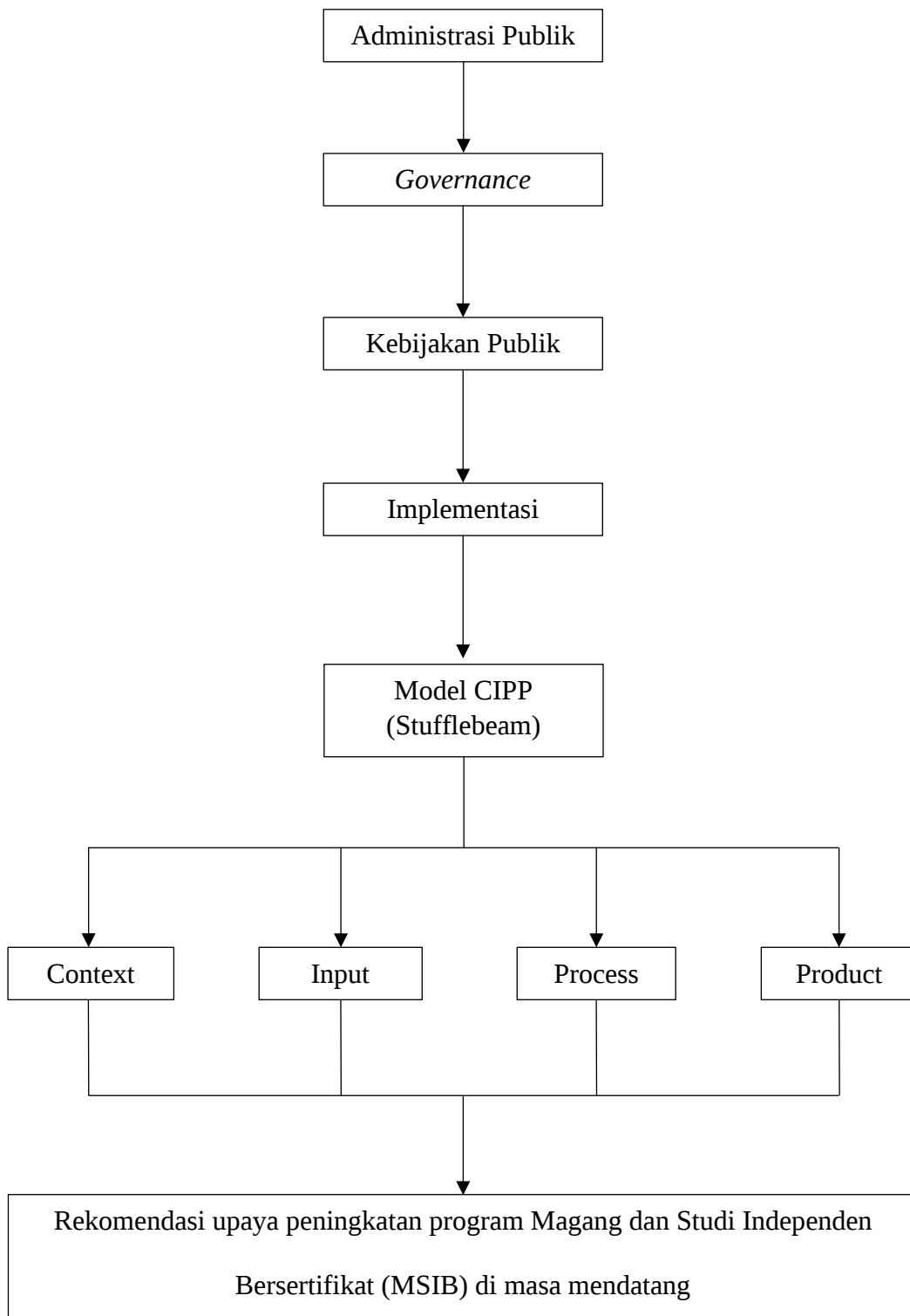


Gambar 1. 9 Model CIPP Stufflebeam

Sumber: Yale Poorvu Centre for Teaching and Learning

Berdasarkan kajian teori, penelitian ini menggunakan model CIPP Stufflebeam untuk menganalisis implementasi program MSIB dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro. Hal ini dikarenakan model CIPP melihat dari segala aspek yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu program secara komprehensif dan memungkinkan penelitian ini menghasilkan temuan yang lebih mendalam.

1.6.3 Kerangka Teori Penelitian



Tabel 1. 2 Kerangka Teori

1.7 Operasional Konsep

Pokok penelitian yang akan dibahas ialah permasalahan mengenai bagaimana implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro. Implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro adalah bagaimana para aktor melaksanakan kegiatan MSIB untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan keterampilan dan mengurangi masa tunggu lulusan dalam mencari pekerjaan.. Implementasi program MSIB ini dilihat dari fenomena yang terjadi baik di FISIP Universitas Diponegoro maupun pada saat mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro menjalankan program MSIB di tempat magangnya. Selain itu, adapun proses implementasi ini akan dikaji dengan regulasi yang ada dan menggunakan Model CIPP Stufflebeam.

1.7.1 Implementasi

Kebijakan program MSIB telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pada pasal 15 dan 18. Pelaksanaan program MSIB diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang diperbarui oleh Kemendikbudristek pada tahun 2023. Upaya pemerintah melaksanakan program MSIB yaitu untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan untuk mempersingkat masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan. Pada penelitian ini, peneliti menilai kesesuaian implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro dengan yang telah direncanakan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Magang dan STudi Independen Bersertifikat serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi

pelaksanaan program tersebut menggunakan Model CIPP Stufflebeam, sebagai berikut:

a) *Context* (Konteks)

Komponen-komponen yang mendukung pelaksanaan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro meliputi: a) Landasan, tujuan, dan sasaran program yang jelas dan didukung regulasi pelaksanaan program, b) Masalah yang melatarbelakangi kebutuhan adanya program MSIB

b) *Input* (Input)

Menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai melalui komponen input meliputi: a) sumber daya manusia yang terlibat, seperti kompetensi tenaga kependidikan dan mentor dari mitra yang terlibat, termasuk keaktifan mereka dalam pembimbingan, koordinasi, dan evaluasi capaian mahasiswa, b) sarana pendukung, seperti platform informasi, ruang diskusi, serta dukungan administratif., dan c) prosedur atau pedoman pelaksanaan program MSIB, seperti ketersediaan SOP, pedoman teknis, serta alur pendaftaran dan pelaksanaan program.

c) *Process* (Proses)

Komponen-komponen yang mendukung implementasi program MSIB pada mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro meliputi: a) pelaksanaan teknis, komunikasi, dan koordinasi antar seluruh aktor yang terlibat, b) kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan program MSIB, dan c) pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai prinsip penilaian.

d) *Product* (Produk)

Menilai kesesuaian hasil dengan tujuan program melalui komponen-komponen meliputi: a) Waktu mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro lulusan program MSIB mendapatkan pekerjaan, b) Kepuasan peserta terhadap program MSIB, dan c) Faktor yang mempengaruhi peserta dalam kesiapan kerja, seperti perubahan pada kepercayaan diri, keterampilan kerja (*soft/hard skills*), dan wawasan dunia kerja setelah mengikuti MSIB.

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Evaluasi kebijakan program MSIB pada mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro	<i>Context</i> (Konteks)	Landasan, tujuan, dan regulasi program: Adanya dokumen resmi yang menjelaskan landasan hukum, tujuan, dan sasaran program MSIB; serta keterkaitan dengan kebijakan MBKM.
		Masalah yang melatarbelakangi: Terdapat kebutuhan peningkatan kesiapan kerja mahasiswa; adanya kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja.
	<i>Input</i> (Input)	Sumber daya manusia: Kompetensi tenaga kependidikan dan mentor dari mitra yang terlibat, termasuk

		keaktifan mereka dalam pembimbingan, koordinasi, dan evaluasi capaian mahasiswa.
		• Sarana pendukung: Ketersediaan fasilitas seperti platform informasi, ruang diskusi, serta dukungan administratif.
		• Prosedur/pedoman pelaksanaan: Ketersediaan SOP, pedoman teknis, serta alur pendaftaran dan pelaksanaan program.
	<i>Process (Proses)</i>	• Pelaksanaan teknis, komunikasi, dan koordinasi: Tingkat efektivitas koordinasi antar mahasiswa dan mitra tempat magang; serta frekuensi pertemuan/monitoring.
		• Kendala dan hambatan: Hambatan teknis seperti akses informasi, masalah administrasi, atau jadwal akademik.
		• Penilaian pembelajaran: Proses penilaian yang dilakukan oleh pembimbing akademik dan mitra;

		kesesuaian dengan indikator kinerja mahasiswa.
	<i>Product</i> (Produk)	• Waktu memperoleh pekerjaan: Lama waktu tunggu kerja mahasiswa MSIB dibandingkan yang tidak mengikuti program.
		• Kepuasan peserta: Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengalaman belajar dan relevansi program dengan kebutuhan dunia kerja.
		• Kesiapan kerja: Perubahan pada kepercayaan diri, keterampilan kerja (soft/hard skills), dan wawasan dunia kerja setelah mengikuti MSIB.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menekankan pada pengamatan fenomena. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meneliti secara berkala dengan memberikan jawaban atas sebuah fenomena atau permasalahan melalui prosedur ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan ketika masalah yang ingin diteliti berupa fenomena yang tidak bisa diukur dengan angka. Penelitian ini menilai kesesuaian implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro dengan yang telah

direncanakan dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi tempat dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang akan diteliti. Pengamatan di lokasi ini dengan tujuan memperoleh informasi yang sebenar-benarnya pada objek yang diteliti. Berdasarkan fokus penelitian ini, yaitu terkait implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro, maka lokus penelitiannya berada di Universitas Diponegoro dengan lokasi penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah narasumber yang akan memberikan informasi, data, fakta, dan pendapat pribadi tentang penelitian. Pada konteks penelitian ini, pemilihan informan tersebut menerapkan teknik *purposive sampling* dengan asumsi bahwa informan tersebut memiliki banyak informasi yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro, peneliti membutuhkan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro, sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Daftar Informan

No	Jabatan	Keterangan
1	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Diponegoro	Informan 1
2	Mentor pada Perusahaan Mitra 1	Informan 2
3	Mentor pada Perusahaan Mitra 2	Informan 3

4	Alumni Ilmu Komunikasi Peserta MSIB (Batch 5)	Informan 4
5	Alumni Ilmu Komunikasi Peserta MSIB (Batch 5)	Informan 5
6	Alumni Administrasi Bisnis Peserta MSIB (Batch 6 dan 7)	Informan 6
7	Alumni Administrasi Bisnis Peserta MSIB (Batch 6)	Informan 7
8	Alumni Administrasi Publik Peserta MSIB (Batch 6)	Informan 8
9	Alumni Administrasi Publik Peserta MSIB (Batch 5)	Informan 9
10	Alumni Ilmu Pemerintahan Peserta MSIB (Batch 5)	Informan 10
11	Alumni Hubungan Internasional Peserta MSIB (Batch 7)	Informan 11

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini memerlukan pengumpulan data yang dilakukan secara lapangan (*field research*) sebagai data primer. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang dihasilkan berupa deskripsi tertulis berdasarkan hasil wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan penelitian terdahulu, berita, dan survei terkait objek penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data pada penelitian implementasi program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro terbagi menjadi dua, antara lain:

- a) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan langsung kepada informan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang terdiri dari literatur, laporan, dokumen, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku panduan pelaksanaan program MSIB atau penelitian terdahulu terkait program MSIB.

1.8.6 Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*, sumber daya primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih penting adalah wawancara mendalam serta observasi (Sugiyono 2022). Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian mereka. Adanya bantuan pedoman pertanyaan, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data antara peneliti dan subjek secara langsung (tatap muka). Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program MSIB di FISIP Universitas Diponegoro.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang dihasilkan dari penelitian diolah dan dianalisis sesuai dengan jenis data. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), metode analisis data terdiri dari tiga fase:

1. Reduksi Data

Proses menyederhanakan, merangkum, dan memfokuskan data sekunder dan data primer menjadi informasi yang relevan dan bermakna agar memudahkan dalam analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Proses mengorganisasi dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis, seperti tabel, grafik, atau diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses menginterpretasikan data untuk menghasilkan pemahaman atau hasil yang menjawab masalah atau tujuan penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam proses pengolahan data penelitian, kualitas data sangatlah penting. Kualitas data ditentukan oleh ketepatan dan keandalan waktu pengumpulan data, yang akan mendukung hasil dan analisis penelitian. Pada konteks ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk memastikan kredibilitas data. Triangulasi sendiri adalah metode yang menggabungkan berbagai perspektif selama proses pengumpulan dan analisis data, termasuk sumber, metode, dan waktu. Dalam Habayahan et al. (2021), Sugiyono menyatakan terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pada penelitian ini, jika data yang dilaporkan sama dengan data hasil perolehan peneliti, maka data dapat dikatakan valid.